

BAB II

INDUSTRI TEKSTIL INDIA DAN PASAR UNI EROPA: ISU LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PERDAGANGAN TEKSTIL

Tekstil merupakan salah satu komoditi tertua yang diperdagangkan secara global. Sebelum munculnya istilah negara bangsa, beberapa peradaban mulai berinteraksi melalui jalur perdagangan sutra di mana tekstil mampu berkembang pesat. India merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan tekstil sebagai produk tertua yang diperdagangkan dan dimodernisasi. Sebagai hub manufaktur tekstil global, India menjadi pasar produksi tekstil berbahan baku kapas kedua terbesar di dunia. Ketika India memasuki pasar neo liberalisme, berbagai reformasi dalam perjanjian internasional berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pasar ekspor tekstil India seiring meningkatnya konsumerisme global. Meskipun keterbukaan ekonomi membawa keuntungan bagi sektor tekstil, berbagai dampak dari lingkaran tekstil dalam negeri menjadi penyebab lemahnya regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan.

Uni Eropa merupakan pasar utama bagi berbagai produk India termasuk tekstil. Dengan fokus penulis pada hambatan non tarif, ekspor tekstil India mengalami penurunan ke Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Pada BAB III penulis menekankan salah satu penyebab eksternal dari penurunan ekspor tekstil ke Uni Eropa yang dikarenakan adanya perubahan preferensi masyarakat di

kawasan atas produk-produk yang mengedepankan *sustainability*. Penetapan standar oleh Uni Eropa, negara anggota individu dan perusahaan di kawasan tersebut berkontribusi dalam menurunnya kapasitas ekspor tekstil India. Permintaan tekstil global dan fenomena *fast fashion* memang menuntun berbagai negara produsen pada keterbukaan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Seiring waktu, publik mulai menyadari realitas bahwa pola produksi dan konsumsi dalam lingkaran tekstil tidak berkelanjutan, menjadi penyebab berkurangnya biodiversitas, penumpukan sampah serta perubahan iklim. Dari adanya rasionalitas tersebut, komunitas internasional setuju bahwa mereka harus merubah pola produksi-konsumsi dalam rantai ekonomi global.

Tulisan ini mengeksplorasi industri tekstil India yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan ekspor tekstil terutama ke Uni Eropa sebagai tujuan primer dari ekspor tekstil India akibat masuknya klausul lingkungan-sosial yang diinklusi *single market* tersebut dalam menjalin kerja sama dengan entitas lain.

A. Perkembangan Industri Tekstil India

Industri tekstil merupakan sektor tertua di India sejak 3.000 tahun lalu. Abad ke-18 merupakan awal virtual dari permintaan pakaian secara global. Sejarawan N.K. Chaudhuri menyebutkan bahwa Eropa merupakan sekutu dagang tekstil utama India bahkan sejak sebelum abad ke-18 (Chaudhuri, 1978). Kontinuitas dalam sektor tekstil pra-industrial berkontribusi besar dalam perkembangan lingkungan politik dan ekonomi di India. Selama masa kolonial, sektor tekstil kental dengan eksploitasi dan hal tersebut memberi dampak signifikan pada ekonomi India.

Pada akhir abad ke-19, sejarawan India, R.C. Dutt mengatakan bahwa kolonialisme Inggris saat itu justru mentransformasi sektor tekstil di India dari eksportir menjadi importir kain atau disebut dengan istilah de-industrialisasi yang menjadikan tatanan sosial-ekonomi India sebagai penerima pasif. Akibatnya, terdapat perpindahan besar dalam lapangan kerja di mana sektor agrikultur terutama pertanian kapas mulai banyak diminati karena permintaan bahan baku mentah semakin meningkat (Mukund, 1992).

Ketika India memasuki fase pasar liberal, industri tekstil mampu mengalami pertumbuhan yang cukup masif setelah mengalami stagnasi dalam jangka waktu yang lama. Periode tahun 1990-an merupakan awal pertumbuhan ekonomi India yang mencapai angka 6% (Oberoi, 2013). Industri tekstil India sendiri menyumbangkan 7.5% PDB, 20% total produksi industri, 27% dari pemasukan devisa dan 32% dari pendapatan ekspor negara (Jaybhaye, 2018). Menjadi produsen kapas dan rami terbesar di dunia, industri tekstil mempekerjakan kurang lebih 45 juta orang di India (Centre for Environment Education & Industrial Pollution Prevention Group, 2016). Selama April 2000-Juni 2019, total investasi asing langsung (FDI) untuk tekstil India mencapai \$3.2 miliar. Ekspor tekstil India juga diprediksi akan mencapai \$300 miliar di tahun 2024 (Mann, 2019). Industri tekstil di India terbagi dalam beberapa segmen diantaranya:

Tabel 2.1 Segmen Dalam Industri Tekstil di India

Kapas	India sebagai produsen terbesar dan eksportir kedua terbesar. Hampir 90% tekstil India berbahan dasar kapas yang menjadikannya sebagai <i>white gold</i> .
Sutra	India sebagai produsen terbesar yang berkontribusi pada 18% sutra mentah dunia
Wol	India sebagai eksportir <i>clean wool</i> ke-6 di dunia
<i>Man-made fibers</i>	India sebagai produsen serat sinsetis ke-4 di dunia
Rami	India sebagai produsen terbesar dan eksportir kedua terbesar di dunia

Sumber diolah oleh India Law Offices, 2008

Industri tekstil India berpusat di bagian Utara Rajasthan, Jaipur, Punjab, Kanpur, Delhi, Selatan Bangalore, Erode, Salem, Coimbatore dan Tamil Nadu (India Law Offices, 2008). Industri tekstil terbagi atas sektor yang terorganisir dan sektor yang terdesentralisasi. Sektor yang terorganisir terdiri atas pabrik komposit (pemintalan, penenunan) yang menggunakan teknologi dengan modal intensif untuk produksi masal dan berkontribusi sebanyak 10% atas total keseluruhan produksi tekstil. Sementara hampir 90% nya diproduksi oleh sektor-sektor terdesentralisasi yang tidak terorganisir seperti *power loom*, *handloom*, dan sebagainya (Gupta, 2016). Terdapat empat negara bagian yang menjadi sentral

industri tekstil terorganisir dan pusat investasi besar domestik maupun asing;

Tabel 2.2 Sejumlah Negara Bagian dan Investasi Dalam Industri Tekstil

No.	Negara Bagian	Perusahaan & Investasi
1	Odisha	Perusahaan : Bhadrak Textile Park (Bhadrak) Total investasi : \$299.19 juta
2	Madhya Pradesh	Perusahaan : Development of Garment Park at Bhatauli, Jabalpur Total investasi : \$29.54 juta
3	Maharashtra	Perusahaan : Silk Fabrics Project (Nashik) Total investasi : \$7.03 juta
4	Assam	Perusahaan : Setting up of Handloom Production Unit at HPC Total investasi : \$1.41 juta

Sumber diolah oleh India Brand Equity Foundation & Aranca Research, 2018

Industri tekstil di India dikelola melalui konsep *Public-Private Partnership* (PPP). Sebanyak 19 proyek *textile parks* di bawah *Scheme for Integrated Textile Park* (STIP) dan PPP telah disepakati dengan kepemilikan pemerintah sebesar 40% tahun 2014 (India Brand Equity Foundation; Aranca Research, 2018). Setidaknya lima dari sepuluh negara yang berinvestasi di sektor tekstil India berasal dari Eropa (Wazir Advisors, 2016). Di negara bagian Gujarat saja, terdapat dua investor dari kawasan Eropa yakni *Finnish Firm Ahlstrom* dan *Austrian firm TenCate Geosynthetics*. Adapun investor lokal seperti

Arvind Ltd, Welspun, Vardhaman Group, Alok Industries, Raymond, Garden Silk Mills, Mafatlal, dan Aditya Birla Nuvo (Vibrant Gujarat, 2017). Sementara brand-brand lokal dan internasional yang membuka *outlet* di India seperti Terram, Strata, CMT, Bilsar, Levi's, Mark & Spencer, ZARA, H&M, Forever 21, Mango, GAP, Hugo Boss, Diesel and Kanz, Liz Claiborne dan sebagainya. Secara teknis, terdapat 680 pengeksport dan 369 pengimpor tekstil dari India (Mann, 2019). Dari total 51% investasi asing langsung (FDI) tahun 2016 untuk sektor tekstil secara keseluruhan, 30% nya mengalir untuk mendanai usaha kecil dan menengah (Wazir Advisors, 2016).

Liberalisasi Pasar dan New Economic Policy

Perkembangan industri tekstil di India tidak lepas dari momentum gelombang neo liberalisme awal tahun 1990-an. Sebelumnya di tahun 1950-an, India sudah menjadi salah satu negara produsen tekstil di dunia. Meskipun demikian, proses industrialisasi yang lambat membuat sektor tekstil hanya tumbuh di tingkat industri rumahan. Pada tahun 1980-an, industri tekstil semakin merosot akibat kapabilitas dan kualitas yang rendah dan menuntun pada resesi ekonomi (Roy, 1998). *New Economic Policy* (NEP) atau Kebijakan Ekonomi Baru India dibentuk pada Juli 1991 untuk merespon hutang luar negeri dan krisis valuta asing yang terjadi sejak pertengahan tahun 1980-an. Pada masa itu, IMF dan Bank Dunia mulai mengadvokasi program penyesuaian struktural atau *Structural Adjustment Program* (SAP) yang baru diimplementasikan tahun 1991. SAP kemudian menjadi awal kesuksesan klaim makro atas liberalisasi, privatisasi, devaluasi,

pemangkasan subsidi pemerintah serta pemicu produksi industri dan ekspor nasional (Deshpande & Sarkar, 1995).

Di tahun 1992, industri tekstil India mengalami transisi besar-besaran melalui reformasi kebijakan perdagangan. Pada tahun 1995, ekspor tekstil India naik hingga hampir dua kali lipat sejak tahun 1990 (Roy, 1998). Kenaikan ekspor di tahun 1995 ini dikarenakan adanya pembaruan *Multi fibre Agreement* (MFA) sejak 1974 yang diubah menjadi *Agreement on Textile and Clothing* (ATC) di bawah WTO setelah melalui perpanjangan MFA sebanyak lima kali. MFA merupakan kelanjutan dari peraturan jangka pendek tahun 1961 dan peraturan jangka panjang tahun 1962 perdagangan tekstil kapas yang ditujukan untuk membatasi impor produk tekstil berbahan kapas ke negara-negara maju (Spinager, 1998). Sejak diberlakukan ATC tahun 1994, industri tekstil India mampu mengalami peningkatan kembali terkait penambahan kuota impor untuk tekstil kapas. Setidaknya terhadap dua perubahan dalam sektor tekstil (1) rezim makro ekonomi mulai mengencangkan ekspor tekstil, (2) hambatan-hambatan produktivitas tekstil yang pada awalnya diadopsi melalui sistem ekonomi yang *inward looking* mulai diminimalisir dengan mengurangi lisensi persyaratan ekspor, promosi investasi, modernisasi teknologi dan peningkatan produksi serat sintetis yang sudah dicanangkan sejak *the 1985 Textile Policy* (Balchin & Calabrese, 2019). Perubahan-perubahan kebijakan tersebut mampu menuntun India menjadi kunci ekspor tekstil dan meningkatkan daya saing meskipun sempat mengalami penurunan ketika resesi Asia tahun 1996-8 (Roy, 1998).

Tabel 2.3 Persentase Keuntungan Ekspor Tekstil India & Dunia

Note: India's output share in world output, respectively. Each class of manmade consist of staple fibre and filament yarn

TABLE 9: INDIA AND THE WORLD – SHARE IN EXPORTS

	Cotton Yarn		Cotton Cloth		Textiles and Clothing	
	Export	Share (%)	Export	Share (%)	Export	Share (%)
1980	0.007	0.84	0.056	4.27	1.735	1.82
1990	0.060	4.02	0.132	6.04	4.710	2.22
1995	0.244	13.64	0.169	6.07	7.102	2.67

Sumber diolah oleh Tirthankar Roy, 1998

Kapas merupakan bahan dasar dalam produksi tekstil India. Selama tahun 1970-90, sector pertanian kapas juga mengalami resesi akibat MFA (Roy, 1998). Melalui sejumlah reformasi, produksi kapas juga mengalami peningkatan seiring naiknya jumlah permintaan akan pakaian global. Monsanto merupakan salah satu rezim agrikultur internasional yang masuk dalam kerangka NEP melalui kesepakatan SAP. Pada tahun 1999, Monsanto bersama Mahyco, perusahaan benih agroteknologi India,

menciptakan kapas genetik yang disebut *bt-cotton* dan dilegalkan di tahun 2003. Sebagai hasil, hingga tahun 2012 tercatat 93% kapas India merupakan hasil rekayasa genetik kedua perusahaan raksasa berbasis agrikultur tersebut. Meskipun memberikan keuntungan lebih bagi agroekonomi karena nilai jualnya yang tinggi dan lebih ramah lingkungan terkait rendahnya ketergantungan akan pestisida dan air, *bt-cotton* tidak lepas dari kritikan. Tanaman genetik tersebut umumnya dimiliki oleh para pemilik modal yang menguasai hampir sebagian lahan pertanian di India. Akibatnya, muncul ketimpangan ekonomi yang signifikan antara kaum pemilik tanah dan petani pinggiran dalam kompleksitas sistem pasar oligopoli (Shiva & Jafri, 2004).

Industri tekstil India sebagian besar dikuasai oleh perusahaan swasta dengan investasi dan manufaktur besar yang memiliki nama ditingkat global. Setidaknya terdapat 100 perusahaan swasta yang memiliki saham terbesar dalam lingkaran bisnis tekstil di India. Beberapa perusahaan tersebut yakni (1) Welspun India Ltd, (2) Vardhman Group, (3) Alok Industries Ltd, (4) Raymond Ltd, (5) Arvind Mills Ltd, (6) Bombay Dyeing & Manufacturing Company Ltd, (7) Garden Silk Mills Ltd, (8) Sutlej Textiles & Industries, (9) Rajaplayam Mills Ltd. Milik Ramco Group of Companies yang berpusat di Selatan India dengan kualitas kapas yang baik dan manufaktur masif berorientasi ekspor (Gopalakrishnan, 2015). Akhir tahun 2016, pemerintah semakin mempromosikan investasi untuk memperbarui teknologi melalui skema *Technology Up-gradation Fund Scheme* (TUFS) dengan target capaian USD 28.4 miliar. Pemerintah dalam kampanye *Make in India* juga memberi keleluasaan bagi investor asing untuk berinvestasi hingga

100% pada sektor tekstil dan garmen yang semakin meningkatkan retailer dan brand global untuk mengandalkan India sebagai sumber produksi (Balchin & Calabrese, 2019). Hingga tahun 2017, perusahaan swasta menguasai 63% saham dari industri tekstil di India (India Brand Equity Foundation (IBEF), 2017).

B. Pengaruh Industri Tekstil terhadap Sosial dan Lingkungan di India

Meskipun berkontribusi besar bagi perekonomian negara dan peluang kesempatan kerja khususnya bagi kaum wanita, mega industri tekstil di India tidak lepas dari berbagai masalah sosial dan lingkungan seperti upah minimum yang tidak jelas dan polusi (Pande, 2017). Aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk sebagai akses India ke dalam pasar internasional justru menjadi jurang degradasi sosial dan lingkungan sebagaimana laporan ILO tahun 2004 yang menyebut bahwa industri India memunculkan pihak pemenang dan yang kalah (Supriya & Vidya, 2012). Struktur industri tekstil India yang terbagi atas sektor yang terorganisir dan yang terdesentralisasi justru menimbulkan masalah lain. Kebijakan ini memang ditujukan guna menciptakan industri-industri kecil padat karya. Namun, India menghadapi konsekuensi isu polusi di mana distrik Tirupur dan Vapi mengalami polusi air dan udara yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kebijakan industri yang terdesentralisasi tidak memperhatikan masalah teknologi konvensional, tenaga kerja yang tidak terorganisir, bahan kimia yang berbahaya, penggunaan mesin diesel untuk penenunan, kapas GM, metode kerja yang salah sehingga menimbulkan banyak masalah lingkungan dan sosial yang tragis (Zsakay, 2018).

1. Eksploitasi Buruh Tekstil

India memiliki catatan yang buruk dalam manufaktur pakaian dan pengumpulan sampah akibat pemberian upah yang minim terhadap pekerja sehingga menciptakan masyarakat sosial yang rendah. Pekerja di industri tekstil sebagian besar adalah wanita yang telah diorganisasikan sejak tahun 1970-an. Selama masa kolonial, pabrik-pabrik tekstil di India sudah berorientasi ekspor dan sangat kompetitif. Namun, karena hanya terdapat sedikit investasi dan modal, perusahaan mengerahkan tenaga kerja dengan tanpa regulasi dan sedikit perlindungan. Hal ini juga diungkapkan Lembaga Pencegahan Polusi Industri bahwa hukum tenaga kerja di India masih sangat rendah. Tidak seperti industri lain di dunia yang mengikuti standarisasi neo liberalism, sistem dan aturan pekerja dalam industri pakaian di India tetap memakai gaya kolonialisme yang eksploitatif seperti ruang kerja yang tidak memadai, standar jam kerja yang buruk hingga pelecehan seksual (Supriya & Vidya, 2012).

Akhir tahun 1990-an, Bank Dunia merevisi fokus eksklusif bagi para pekerja yang bekerja sama dengan organisasi buruh internasional (ILO) dalam rangka mempromosikan wirausaha swasta untuk dijadikan pilihan bagi para pekerja yang mengalami tekanan. Namun, kebijakan ini nyatanya menemui jalan buntu akibat lemahnya hubungan pekerja dengan pemerintah, pemilik modal dan kaum proletariat (Agarwala, 2016). Lembaga non-profit Remake mencatat 75 juta orang di seluruh dunia bekerja dalam lingkaran produksi pakaian di mana 80% pekerjanya adalah wanita berusia 18-25 tahun. Sejak masuknya India ke dalam gelombang neo liberalisme, pemberlakuan SAP kemudian dituduh

memperburuk regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan sosial di India (Sustainable Brands, 2018). Sebanyak 99.2% buruh tekstil tunduk pada sistem kerja paksa berdasarkan hukum India karena mereka tidak menerima upah minimum yang ditetapkan negara. Buruh tekstil umumnya hanya menerima sepersepuluh dari upah minimum yang bahkan sering mengalami keterlambatan pemberian (Ratcliffe, 2019).

Buruh tekstil terutama di bagian barat daya Bangalore, kota dengan orientasi ekspor tekstil, rata-rata bekerja selama 46 jam seminggu dalam dengan upah sekitar \$2.27 per hari yang apabila diakumulasikan dalam sebulan tidak sampai pada standar upah minimum di negara tersebut (Sustainable Brands, 2018). Penelitian dari University of California yang didukung Humanity United juga menemukan pekerja wanita dan anak-anak pada sejumlah sektor tekstil di India hanya diberi upah sebesar 15 sen (11p). Setidaknya terdapat satu dari lima buruh tekstil di India berusia di bawah 17 tahun dari hasil wawancara terhadap 1.432 buruh bekerja di sektor tekstil dengan usia 10 tahun menjadi yang termuda. Di utara India, 2/3 pekerja anak bahkan tidak bersekolah untuk mencukupi kebutuhan hidup (Ratcliffe, 2019). Sebelumnya, Laporan dari Departmen Tenaga Kerja AS tahun 2018 mengungkap banyaknya tenaga kerja anak dalam industri pakaian di Argentina, India, Pakistan, Indonesia, China, Bangladesh, dan sebagainya (Drew & Reichart, 2019).

Penelitian yang sama dari University of California juga mengungkapkan satu dari sepuluh orang terjebak dalam lingkungan kerja yang eksploitatif sementara 6% nya bekerja untuk melunasi hutang di utara India (Ratcliffe, 2019). Tahun 2014, tercatat 100 peristiwa bunuh diri buruh tekstil di Tamil Nadu sebagai kawasan

yang menyumbang 13% ekspor kain akibat eksploitasi dan ketidakadilan. Tahun 2018, Tamil Nadu Textile and Common Labor Union mencatat 11 kematian yang belum diproses secara keseluruhan (Pandey, 2018). Peneliti Siddharth Kara dari University of California juga mengatakan bahwa sebagian besar buruh tekstil di India mengalami berbagai masalah penyakit seperti masalah penglihatan dan gangguan sendi yang tidak mendapat pertolongan medis selama bekerja (Ratcliffe, 2019).

Lembaga non-profit, Global Labor Justice mengungkapkan melalui penelitiannya pada 540 pekerja tekstil yang bekerja untuk Gap dan H&M di India, Indonesia, Sri Lanka, Kamboja dan Bangladesh rentan mengalami kekerasan fisik dan seksual. Tuntutan akan upah kecil dan kondisi kerja yang buruk tahun 2018 bahkan sempat menghentikan produksi garmen selama beberapa hari di dua *brand* raksasa, GAP dan H&M di Bangalore. Global Labor Justice juga menyalahkan suplai *fast fashion* GAP dan H&M karena tidak memiliki kontrak dan target produk yang jelas. *The Ethical Trading Initiatives*, platform di mana Gap dan H&M terlibat didalamnya, menyatakan keprihatinan dan meminta dua retailer raksasa tersebut menginvestigasi lebih lanjut. H&M, tentang kejadian di Bangalore, mengklarifikasi hal tersebut menentang kebijakan kode etik perusahaannya serta melanggar *International Convention against Gender-based Violence in the Workplace* oleh ILO. Sementara Gap menekankan bahwa *Code of Vendor Conduct* meliputi perlindungan terhadap lingkungan dan HAM (Hodal, 2018).

Dalam sektor pertanian kapas, pemberlakuan program penyesuaian struktural yang semakin mensubordinasikan kaum petani menyebabkan banyak anak terlahir cacat

akibat masifnya penggunaan pestisida pada tanaman kapas lokal supaya mengalami pertumbuhan masif dan cepat guna bersaing dengan *bt-cotton*. Hak paten yang dimiliki Monsanto dan Mahyco juga membuat para petani lokal terus tertekan di samping terus menggiatkan produksi kapas lokal yang bernilai rendah dan memerlukan banyak pestisida dan air. Laporan pemerintah menyebutkan bahwa sebanyak lebih dari dua juta petani gurem dan marjinal kehilangan tanah setiap tahun di mana dari 27.9 juta pada 1951 menjadi 50 juta sejak tuntutan SAP mulai diberlakukan sehingga memaksa petani beralih menjadi buruh dengan upah harian yang rendah. Sejak tahun 1951, pertanian setidaknya memberi kesempatan kerja bagi 72% populasi dan 59% bagi PDB. Namun, di tahun 2001, sektor pertanian hanya mampu mempekerjakan 54% dari populasi saja sementara PDB turun drastis ke angka 24%. Jumlah warga yang kehilangan tanah juga meningkat dari 35% di tahun 1987 menjadi 55% di tahun 2005 (Supriya & Vidya, 2012).

Hilangnya kendali atas lahan dan hak paten juga membuat banyak warga yang bergantung pada sektor pertanian kelaparan dan akhirnya menuntun pada bunuh diri massal di tahun 1999. Tercatat, 500 petani kapas bunuh diri di Maharashtra, Punjab, Karnakata, Andhra Pradesh, Haryana setelah meminum pestisida akibat tingginya harga pestisida, biji kapas hibrida/Bt-Cotton, hingga harga penjualan yang rendah dan lahan yang menyusut (The International Forum on Globalization, 2003). Ketika ekspor pakaian menyumbang PDB hingga 4% serta 20% dari output industri pada tahun 2001, buruh pabrik dalam lingkaran industri tersebut masih dicap sebagai pekerja serabutan dengan upah minim. Menanggapi munculnya berbagai gejala asimetris, Komite Parlemen

India melalui panel ahli teknisi yang ditunjuk Mahkamah Agung akhirnya memberhentikan uji coba *bt-cotton* setelah 10 tahun lamanya, namun banyak hal yang telah mengubah agrikultur India berkat monopoli dan royalti Monsanto atas 93% hak paten kapas. Kerentanan pada sektor pertanian kapas yang berlanjut kembali menuntun petani ke dalam hutang dan gelombang bunuh diri masal petani kapas yang terjadi lagi di tahun 2011-12 (Shiva, 2013).

2. Degradasi Lingkungan

Industri *fashion* cepat dan konsumen global tidak dapat menyangkal dampak negatif terhadap lingkungan dari gaya hidup konsumtif di negara-negara berkembang. Industri tekstil merupakan pengguna air dan energi seperti batubara dan minyak paling besar yang menyumbangkan polusi dalam berbagai bentuk (Perry, 2018). Pertumbuhan meteorik di India juga memunculkan kekhawatiran industri pakaian yang menimbulkan polusi mulai dari sampah pabrik hingga emisi karbon (Segran, 2019). Tanaman kapas yang menjadi andalan tekstil India, merupakan tanaman yang memerlukan banyak air dan tenaga listrik dengan rentan terhadap perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan terkait tekanan krisis air. Kapas merupakan tanaman yang mengonsumsi 24% insektisida dan 11% pestisida meskipun hanya menggunakan 3% dari seluruh tanah subur di dunia (Jaybhaye, 2018). *Intergovernmental Panel on Climate Change* pada tahun 2009 menyatakan bahwa pertumbuhan industri tekstil India menyebabkan peningkatan emisi gas CO₂ (Hiremath, Kattumuri, Kumar, Khatri, & Patil, 2012). Sebanyak 60% tekstil India berbahan dasar kapas yang budidayanya mengonsumsi 25% pestisida global,

menghasilkan limbah lumpur dan zat kimia yang mencemari air (Bauer & Jagasia, 2019).

India memiliki area pertanian kapas terluas di dunia dengan 9 juta ha, mewakili sekitar 20-25% dari total area global yang tekonstentrasi di 9 negara bagian yakni Haryana, Punjab, Maharashtra, Gujarat, Pradesh, Tamil Nadu, dan sebagainya (Jaybhave, 2018). Apabila dikalkulasikan, pemakaian pestisida di India jumlahnya mencapai 50% (Morlet, Opsomer, Herrmann, Balmond, Gillet, & Fuchs, 2017). Hal tersebut kemudian menempatkan India di urutan ke-94 dalam index kesejahteraan dengan lingkungan berada dalam skor paling rendah (The Legatum Prosperity Index, 2018). *Bt-cotton* yang diciptakan untuk menghemat air dan pestisida bahkan dianggap gagal dan tetap mencemari lingkungan (Shiva & Jafri, 2004).

Kanpur adalah kota eksportir tekstil di India. Wilayah ini terletak di sepanjang sungai Ganga, sungai yang disucikan 800 juta umat Hindu dan sumber penghidupan. Namun, sungai ini menjadi tempat pembuangan akhir 50 juta liter limbah kain pabrikan yang beracun. Bahan kimia yang terkandung di dalam limbah seperti kromium-6, zat kompleks yang biasa digunakan untuk obat penyakit kulit, mengalir pertanian lokal bahkan sumber air minum warga. Setidaknya di setiap rumah terdapat warga yang terkontaminasi ruam kulit, *pustule*, *jaundice* hingga kanker (Morgan, 2015). Meningkatkan permintaan akan bahan murah juga meningkatkan resiko fatal bertarif mahal pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Selain Kanpur, Solapur yang terletak di negara bagian Maharashtra juga merupakan kawasan yang terkenal dengan pusat ekspor tekstil. Produksi tekstil masal di

Solapur memakan penggunaan energi, air, bahan kimia dalam jumlah masif yang berdampak buruk pada lingkungan. Solapur masuk dalam 17 kota dengan index polusi terburuk tahun 2012 bersama Agra, Bangalore, Delhi, Ahmedabad, Kanpur, Chennai, dan sebagainya (Hiremath, Kattumuri, Kumar, Khatri, & Patil, 2012). Di negara bagian Rajasthan, industri tekstil menyumbangkan limbah berbahaya sementara tempat pengolahan limbah yang memadai belum tersedia (United Nations Climate Change, 2008).

Sebanyak 7 dari 10 kota paling berpolusi terletak di India sementara New Delhi menduduki peringkat ke-7 yang menjadikannya ibukota dengan tingkat polusi tinggi. Analisis senior Greenpeace untuk urusan polusi udara, Lauri Myllyvirta, mengatakan bahwa Asia Selatan sangat bergantung pada bahan bakar padat, biomas dan batubara yang digunakan mulai dari rumah tangga, transportasi hingga industri. Dengan penduduk sebanyak 1.3 miliar di India, peneliti memperingatkan darurat kesehatan publik. Dalam misi Modi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menuntaskan kemiskinan, pemerintah dinilai belum menyelesaikan masalah lingkungan menurut pendiri LSM *care for air in India*, Jyoti Pande Lavakare. Kritik menyalahkan pemerintahan Narendra Modi atas kegagalan mengatasi isu lingkungan dan mengatakan *National Clean Air Program* tidak berjalan (Child, 2019).

Industri tekstil India mengalami peningkatan ekspor pasca kebijakan ekonomi yang baru untuk sektor tekstil diresmikan setelah adanya *Agreement on Textile and Clothing* (ATC) di tahun 1995 dan diperbarui di tahun 2005. Meskipun mengalami peningkatan ekspor, pesatnya produktivitas ekspor tekstil di India menciptakan tambahan jam kerja dengan hukum ketenagakerjaan yang

lemah sehingga menuntun pada eksploitasi buruh tekstil. Selain itu, industriliasiasi terutama pada sektor tekstil menyebabkan degradasi lingkungan akibat kurangnya penanganan terhadap pengolahan limbah dan konsumsi berlebihan dari energi yang tidak terbarukan.

C. Uni Eropa sebagai Pasar Terbesar Tekstil India

India merupakan salah satu pusat manufaktur tekstil terbesar dan eksportir tekstil kedua terbesar di dunia. Uni Eropa (UE) merupakan tujuan primer dari ekspor India yang menerima hampir 60% produk tekstil negara tersebut (Barrie, 2019). India merupakan eksportir keempat terbesar yang menyumbangkan 6% total impor ke kawasan tersebut sebesar \$89 miliar (Wazir Advisors, 2016). Sebanyak 13.5% total perdagangan India mengalir ke Uni Eropa yang menjadikan kawasan tersebut sebagai *partner* dagang utama India. Sementara bagi Uni Eropa, India merupakan sekutu dagang terbesar ke-9. India setidaknya berkontribusi terhadap 22% ekspor tekstil dan 43% pakaian jadi di pasar Eropa. Uni Eropa juga merupakan investor terbesar bagi sektor tekstil India setelah Mauritius dengan stok investasi mencapai €51.2 miliar tahun 2015 (EEAS, 2017). Perjanjian bilateral terkait perdagangan tekstil dengan Uni Eropa mulai terjalin secara intens sejak penandatanganan nota kesepahaman dalam *EU-India Cooperation Agreement* pada Desember 1994. Nota kesepahaman ini memungkinkan pemberian kuota impor lebih di bawah *Uruguay Round's Agreement on Textiles and Clothing* (European Commission, 2019).

Pada Januari 1995, Uni Eropa juga setuju untuk menghapus semua hambatan perdagangan pada produk *handloom* dan *cottage* sesuai yang tercantum dalam pasal 5 perjanjian perdagangan tekstil India-Uni Eropa. Berkat adanya sejumlah kesepakatan tersebut, ekspor tekstil India tahun 2002 ke 15 negara anggota Uni Eropa menapakai \$7.19 miliar dari total \$20,9 miliar ekspor tekstil di seluruh dunia (*lihat gambar di bawah*) (Saini, 2012). Sesuai peraturan penerimaan kuota impor yang ditetapkan *World Trade Organization* (WTO), Uni Eropa menerima 7.000 - 8.000 ton ekspor tekstil India hingga tahun 2004. Dalam perjanjian bilateral, Uni Eropa juga menerima 2.500 - 3.000 ton tekstil India pada tahun sebelumnya terlepas dari kuota yang ditetapkan WTO (European Communities, 1994).

Tabel 2.4 Top 5 Destinasi Ekspor Tekstil India Tahun 2002

No.	Partner Name	Export Value (\$million)
	World	20,969,201
1	EU15	7,118,106
2	USA	4,660,667
3	United Arab Emirates	1,262,704
4	China	988,277
5	Turkey	669,228

Sumber: World Integrated Trade Solution, UN Comtrade 2002. Diolah oleh Gordhan K. Saini, 2012

Selama Januari-Juni 2006, India menempati urutan ketiga ekspor tekstil ke Uni Eropa dengan persentase saham mencapai 8.1% di bawah China dan Turki. Tahun 2007-8, setidaknya tiga negara anggota Uni Eropa yakni Inggris, Jerman, dan Prancis menjadi negara *Top 5* tujuan

ekspor pakaian jadi India terbanyak dengan presentase total gabungan ekspor produk rajutan dan anyaman (*knit and woven*) 27.57% setelah Amerika Serikat 30.54% (Malagi, 2013).

Tabel 2.5 Persentase Ekspor India ke-5 Negara Tujuan Utama 2007-8

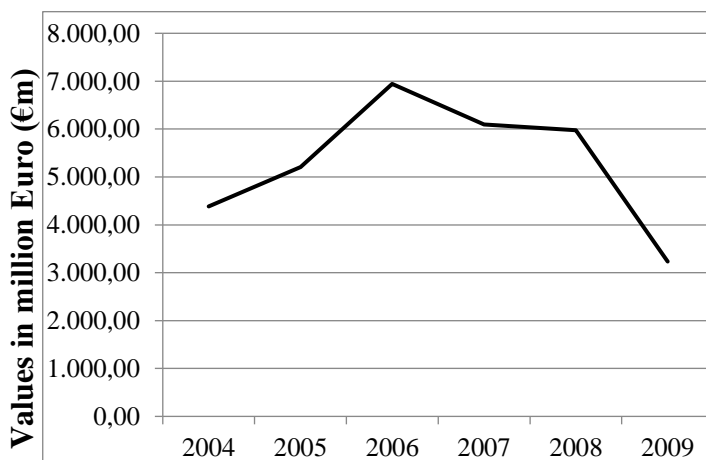
	% Share in different Types		
	All	Knit	Woven
World	100	100	100
USA	30.54	29.84	31.07
UK	12	10.78	12.95
Germany	8.31	11.05	6.22
France	7.26	8.27	6.48
UAE	6.79	5.69	7.63
<i>European Countries (UK, Germany, France) Combined</i>			
	27.57	30.1	26.8

Sumber: Apparel Export Promotion Council

Pada rentang tahun 2007-10, sejumlah desainer asal Prancis, Jerman dan Inggris memulai usaha patungan dengan para desainer India yang mendorong produktivitas dan pasar ekspor. Perusahaan-perusahaan Italia juga berinvestasi sebanyak USD252.7 miliar bersama India Inc. Carrera dalam upaya ekspansi kapasitas dan manufaktur tekstil India (Nakkeeran & Pugalendhi, 2010). Sebelumnya, ekspor tekstil India sempat mengalami penurunan sejak *Multi Fiber Agreement* (MFA) tahun 1974 ditetapkan untuk membatasi produk kain berbahan kapas yang pada dasarnya hanya ditujukan untuk melindungi produk domestik negara-negara maju. Setelah MFA berakhir pada Januari 2005, ekspor India memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor tekstil berbahan

kapas dengan diperbaruinya *Agreement on Textile and Clothing* (ATC). Pada rentang waktu tahun 2004 – 2009, ekspor benang, kain, dan pakaian jadi ke Uni Eropa mengalami fluktuasi terutama di tahun 2005-6 namun kembali mengalami penurunan tahun 2008-9 yang disebabkan oleh resesi global dan pembaruan kerja sama yang mengalami stagnasi (Manoj, 2014).

Grafik 2.1 Ekspor Tekstil India ke Uni Eropa tahun 2004-9



Sumber diolah oleh Nakkeeran & Pugalendhi, 2010

Beberapa kuartal pasca resesi global, ekspor tekstil mulai berada diangka stabil namun kembali mengalami perlambatan di awal 2013 ketika Uni Eropa mengukuhkan perjanjian tekstil dengan Bangladesh pasca tragedi Rana Plaza. Tahun 2016, Uni Eropa mengimpor sebanyak 19.8% tekstil India dari total keseluruhan impor barang dari negara tersebut (EEAS, 2017). Namun, angka itu

turun dari tahun sebelumnya karena hingga tahun tersebut peringkat India sebagai eksportir tekstil global turun menjadi posisi ke-5 (Mukherjee, Paul, Sarma, & Sinha, 2019). Pada 2016, sektor tekstil yang menyumbang pendapatan nasional kedua terbesar di India berada di titik rendah dengan total ekspor global berada di angka USD19.1 miliar atau turun USD22.3 miliar dari tahun sebelumnya. Sementara ekspor kapas turun dari \$4.5 miliar tahun 2013-14 menjadi \$3.4 miliar tahun 2017-18 (Suneja, 2019). Ekspor tekstil secara keseluruhan turun dari 51% di tahun 2017 menjadi 45% atau sekitar 7% di awal tahun 2019 (Parashar, 2019). Turunnya kapasitas ekspor kapas dan pabrik ini mempengaruhi keseluruhan rantai produksi tekstil termasuk hilangnya lapangan kerja mulai dari agrikultur (kapas) hingga barang jadi (Suneja, 2019).

Perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang baru dengan spesifikasi kerangka *Broad-based Investments and Trade Agreement* (BTIA) antara India dan Uni Eropa telah dibahas sejak tahun 2007. Namun tahun 2013 setelah melewati 16 kali negosiasi, perjanjian yang baru belum mencapai kesepakatan dan mengalami stagnasi. Duta besar UE untuk India, Tomasz Kozlowski mengatakan bahwa Parlemen Eropa tidak akan menindaklanjuti FTA apabila sektor *automobile* tidak disepakati (The Hindu Business Line, 2019). Selain itu, pertimbangan pengurangan tariff impor yang disisipi klausul lingkungan, sosial dan hak asasi manusia dirasa tidak akan tercapai. Dari persepektif Uni Eropa, negosiasi perdagangan dan sejumlah kerja sama harus dilandasi pada pembangunan yang berkelanjutan dengan klausul sosial dan lingkungan yang mana India menyatakan keberatan untuk memasukan

klausul-klausul tersebut dalam perjanjian perdagangan pada awalnya (Khorana, 2019).

Pada tahun 2016 dalam *EU-India Summit*, Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, menekankan dukungan keberlanjutan negosiasi yang didasarkan pada sejumlah isu yang dikaitkan dengan *EU's New Trade Strategy*. Melalui kerangka yang dikeluarkan *European Trade Commissioner* (ETC) tersebut, Cecilia Malmström sebagai kepala ETC pada November 2015 berjanji untuk menindaklanjuti kerja sama dengan India yang dapat memberi kesempatan akses nol percent pada tariff impor. Inisiatif dagang ini diproyeksikan sebagai agenda lima tahun untuk menciptakan lapangan kerja di Uni Eropa sekaligus mempromosikan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia (Nataraj, 2016). Agenda promosi pembangunan berkelanjutan dari Uni Eropa inilah yang seharusnya menjadi patokan tekstil India dalam berinteraksi bisnis.

Kepala dewan *Cotton Textile Export Promotion*, R.K. Dilma menegaskan bahwa apabila FTA terbaru tidak kunjung disepakati maka beberapa sektor dalam India akan terus mengalami penurunan (Jha, 2016). Tahun 2018, pembicaraan bilateral dimulai lagi melalui *Strategic Partnership* namun hanya bentuk penguatan hubungan, belum sampai membahas perjanjian ekspor-impor (Khorana, 2019). Melalui pembentukan *free trade agreements* (FTA) yang baru dengan UE, ekspor tekstil India akan berkesempatan memperoleh harga kompetitif dan meningkatkan kapasitas ekspor.

D. Hambatan Ekspor Tekstil India di Uni Eropa Terkait Isu Lingkungan & Sosial

Meskipun menjadi industri kedua terbesar, industri tekstil di India merupakan salah satu industri paling terdisintegrasi. Lemahnya hukum ketenagakerjaan memicu banyaknya eksploitasi buruh yang terlibat dalam jam kerja panjang tanpa standar upah minimum yang jelas. Selain itu, kondisi tempat kerja yang kurang memadai membuat buruh tidak memiliki akses pada fasilitas kesehatan dan area terbuka yang cukup. Pengelolaan limbah dan konsumsi masif dari bahan kimia dan batubara juga memperburuk degradasi lingkungan di sekitar pabrik-pabrik tekstil yang beroperasi (Centre for Environment Education & Industrial Pollution Prevention Group, 2016). Akibatnya, tanah, udara dan air bersih menjadi tercemar yang mengganggu kesehatan warga sekitar.

Isu lingkungan dan sosial (perdagangan yang adil, regulasi ketenagakerjaan, dsb) mulai menjadi *highlight* ketika Uni Eropa, AS, dan beberapa negara maju lain memasukannya sebagai hambatan non-tariff tahun 2005-6 dengan pengertian bahwa negara-negara tersebut mempertimbangkan produk dari negara yang memiliki preferensi terhadap lingkungan-sosial (Kumar, Begum, & Das, 2018). Dari adanya berbagai masalah regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan, ekspor India ke Uni Eropa mengalami kendala seiring organisasi supranasional tersebut mengangkat isu-isu lingkungan dan sosial ke dalam area kerja samanya dengan entitas lain yang tercantum dalam laporan *the Trade Sustainability Impact Assessment* tahun 2009 pasca pertemuan sejumlah LSM Uni Eropa dan India dalam pembahasan FTA

melalui *civil society bilateral meetings* (The European Commission, 2009).

Survei *Organization for Economic Co-operation and Development/OECD* tahun 2005 mengidentifikasi pencantuman label, standar teknis, ukuran *anti-dumping*, dan hukum mengenai pekerja anak merupakan hambatan-hambatan kritical ekspor ke Uni Eropa. Oleh karena klausul lingkungan dan sosial yang dibawa Uni Eropa, perjanjian dagang yang baru (FTA) antara India-Uni Eropa mengalami hambatan sejak tahun 2007. Studi lain juga menyebutkan bahwa aturan non-preferensi dan diskriminasi atau diidentifikasi sebagai *non-tariff barriers* dalam sektor tekstil merupakan hambatan utama India ke Uni Eropa (Khorana & Soo, 2016). Adanya standar-standar impor yang dikeluarkan pasar internasional khususnya Uni Eropa di atas secara lebih lebar dikonsepsikan sebagai hambatan legislatif eksternal.

Dalam ekspor ke Uni Eropa, beberapa pengamat menyebut hambatan ekspor tekstil India ke kawasan tersebut sebagian besar dilandasi atas kurangnya pemahaman akan komitmen aktivitas internasional dalam pasar global (Khorana & Soo, 2016). Meskipun MFA telah hangus di tahun 2005, di tahun yang sama Uni Eropa justru semakin mengencarkan larangan-larangan impor seperti anti-dumping, isu iklim, norma ketenagakerjaan hingga kesejahteraan hewan. Brand-brand ternama seperti Levi's, Tom Hilfiger, Ann Taylor dan Mexx sempat memutus kerja sama dengan sejumlah eksportir India setelah pemerhati internasional *Clean Cloth Campaign* dan *Labor Union Federations* yang berbasis di Brussels mengungkapkan adanya pelanggaran terhadap hak buruh tekstil di tahun 2008 (Saini, 2012).

Komisi Eropa bahkan mengatakan bahwa penurunan kuota impor disebabkan oleh lemahnya tekstil India dalam memenuhi standar internasional mengenai lingkungan (European Commission, 2019). Standar internasional tersebut seperti tekstil berbahan kapas tidak boleh mengandung kromium dan sulfide di atas pH 2 serta phenolics di atas Ph 5 sementara dalam teknik pewarnaan dilarang untuk melebihi Ph 9.3-13 dan berbagai aturan lain (Narayanan, 2018). Importir dari Uni Eropa yang tergabung dalam *Leather and Footwear Industry* umumnya mendesak penyuplai untuk menekan batas penggunaan terhadap bahan kimia berdasarkan *EU's Registration, Evaluation, Authorization, Restriction of Chemicals* (REACH), persyaratan pengujian dan sertifikasi serta pengemasan dan pengolahan limbah yang sebagian besar aturan ditetapkan oleh masing-masing negara anggota (Khorana & Soo, 2016).

Sebanyak 43% aliran tekstil India ke UE berbahan dasar kapas yang boros dalam penggunaan air dan pestisida. Hal ini kemudian menempatkan sektor tekstil India dengan 90%-nya berbahan kapas ke dalam masa kritis. Kurangnya akses perusahaan pada tenaga-tenaga penguji ahli dan laboratorium menjadikan sertifikasi India kurang diterima Uni Eropa. Selain itu, sutra yang menjadi bahan baku terbesar lain juga berkontribusi pada percepatan pemanasan global sementara wol yang menempati urutan ke-6 terbesar dalam sektor produksi India juga menyebabkan akumulasi efek gas rumah kaca (Šajn, 2019). India memiliki *eco label* bernama *eco mark* sejak 1991 yang harus dimiliki eksportir sebagai identifikasi syarat-prasyarat standar global pada produk kapas, wol, fabric buatan tangan, serta produk-produk sutra dan rami yang memiliki standarisasi ramah

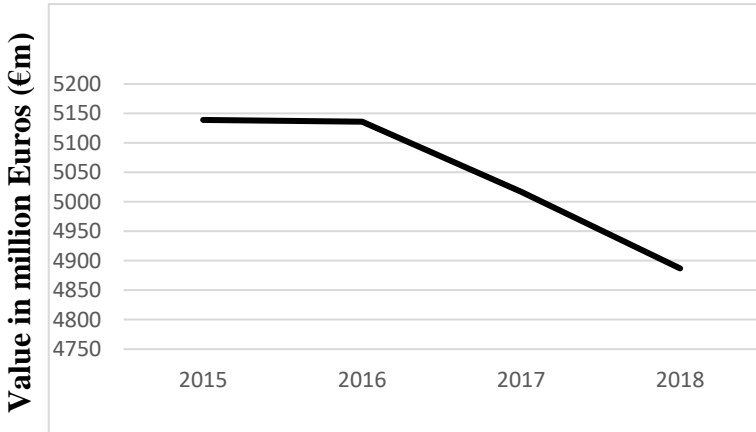
lingkungan dan kode etik perusahaan (Begum & Kumar, 2018). Namun, pemberian label termasuk pengawasan hanya terdapat pada industri-industri besar yang teroganisir di kota sementara India memiliki ribuan industri tekstil yang terdesentralisasi (Hodal, 2018). Selain itu, importir Denmark, Jerman, dan Italia mengatakan bahwa label tersebut masih minim informasi dan transparansi, memiliki konsep yang membingungkan, teknisi yang buruk, harga yang mahal dan bahkan tidak mengkonversi adanya konsep keberlanjutan (Kumar, Begum, & Das, 2018).

Dari adanya berbagai standar Uni Eropa terkait lingkungan-sosial, kesepakatan FTA yang baru tidak kunjung tercapai. Tidak adanya kesepakatan baru antara India dan Uni Eropa menjadi celah bagi negara eksportir tekstil lain seperti Bangladesh dan Vietnam untuk meningkatkan produktivitas ekspor mereka ke Uni Eropa. Sebelumnya, Bangladesh dan Vietnam telah menikmati *duty free* dari Uni Eropa di bawah skema *Generalised Scheme of Preferences* (GSP) sejak tahun 2006 yang diklasifikasikan untuk negara dengan pendapatan nasional di bawah rata-rata global oleh Bank Dunia (Hayashi, 2007). Sementara beberapa negara menikmati akses bebas tariff impor ke Uni Eropa, produk tekstil India dikenai tariff pajak hingga 9.5% (Fibre2Fashion, 2019). Bangladesh memiliki akses ke inisiatif Uni Eropa *Everything but Arms* (EBA) dan *Duty Free Quota Free* (DFQF) melalui *Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association* (BGMEA) (Wazir Advisors, 2016). Melalui sejumlah keterikatan kerja sama dengan Uni Eropa dan perusahaan yang beroperasi di sana, Bangladesh bahkan hampir melampaui peringkat India

sebagai eksportir kain terbesar kedua di dunia (Utrikespolitiska Föreningen, 2018).

Dengan adanya stagnasi dalam perjanjian dagang yang baru (FTA), ekspor India mulai mengalami penurunan di tahun 2008 setelah negosiasi FTA pertama tidak disepakati yang dapat dilihat pada grafik 2.1 di atas. Kompetisi pasar ekspor tekstil dari negara-negara yang memiliki *zero duty* seperti Bangladesh dan Vietnam juga berkontribusi terhadap semakin melemahnya integrasi tekstil India ke Uni Eropa terutama pada tahun 2015-2018 di mana impor pakaian Uni Eropa dari India mengalami penurunan dari €5.2 miliar menjadi €4.8 (*lihat grafik di bawah*) (Sabanoglu, 2019). Standar-standar lingkungan dan sosial yang diinklusi Uni Eropa dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain merupakan salah satu hambatan FTA yang tidak tercapai bagi India. Standar-standar lingkungan dan sosial dalam prasyarat kerja sama Uni Eropa ini menjadi pertimbangan seiring meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia, terutama di Uni Eropa, terhadap isu perubahan iklim dan berbagai isu etisme lain.

Grafik 2.2 Impor Pakaian Uni Eropa dari India tahun 2015-18



Sumber: Tugba Sabanoglu, diolah oleh Statista 2019

Penurunan ekspor tekstil India ke Uni Eropa salah satunya disebabkan oleh adanya klausul lingkungan dan sosial yang diinklusi kawasan tersebut dalam menjalin kerja sama dengan entitas lain. Ketika ekspor tekstil India mulai melemah akibat belum dapat mengadopsi nilai-nilai yang menjadi standar dalam lingkaran kerja sama Uni Eropa terkait lingkungan dan praktik etis, negara-negara eksportir tekstil lain seperti Bangladesh dan Vietnam memanfaatkan stagnasi FTA India-Uni Eropa sebagai peluang memperkuat integrasi tekstil kedua negara tersebut ke pasar Eropa yang memberi *duty free* terhadap produk-produk dari negara-negara dengan pendapatan nasional di bawah rata-rata global oleh Bank Dunia. Akibat adanya hambatan-hambatan terkait lingkungan dan praktik etis dalam menjalin kerja sama dengan Uni Eropa, India kemudian perlu mempertimbangkan kebijakan baru untuk dapat mengakses kembali pasar tekstil Uni Eropa.